KEJAHATAN PERKOSAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Kajian dalam Perspektif Victimilogi)

Oleh : I Wayan Kotaniartha

ABSTRAK

Gejala perkoasaan sebagai bentuk kejahatan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Masalah perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia menempatkan posisi wanita korban dalam kedudukan yang lebih rendah dari pada pria. Karena itu wanita selalu menjadi korban aturan hukum yang tidak adil.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sangat mencela kejahatan perkosaan, akan tetapi kultur masyarakat Indonesia masih sebagian besar memandang persoalan perkosaan masih amat tabu dibicarakan di muka umum. Dari sudut victimologi, kultur masyarakat seperti itu akan memperkuat akar menjadi stigmatisasi dan victimisasi struktural bagi pihak korban perkosaan.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan individu (perempuan), masyarakat dan pihak pemerintah atau penegak hukum. Mengingat kekhususan korban perkosaan, maka diperlukan perlindungan khusus bagi korban perkosaan, baik dari segi hukum, psikologis dan pemberian pelayanan lainnya.

ABSTRACT

Raping symptom as a sexual crime form compromises one sosial chalange that must be taken into account more seriously. Raping cases in contex of the indonesian criminal law place women's position lower than men. Thus women always become the victim an unfair law.

Principally, Indonesia community disgrace assault action such as raping, most indonesia people however assume that raping cases are taboo to discuss in public. From the victimological view, such as assumtion can strengten the accurence of structure stigmatization and victimanition for the victim's side.

To prevent raping case, some preventive programs are require involving individual (famale) community and government/law enforcement officers. Seeing the raping victim spesification, a special protection is required for the victim both from the legal, physiological sides and other services.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan kekerasan primitif yang semua tahu terdapat di masyarakat manapun. Gejala-gejala perkosaan sebagai bentuk kejahatan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Dari duhulu kala hingga kini, perkosaan bukan hanya sekadar kekerasan

seks semata, tetapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang berpengaruh oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan adat, agama, bahkan lembaga-lembaga masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, besar seperti negara. Sepintas lalu kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau kalaupun menjadi istimewa, biasanya perkosaan dengan korban perempuan di bawah umur diikuti

pembunuhan. Ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang perkosaan.

Dengan kata lain, melalui pelbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, sering kali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan melainkan juga kadangkala dianiaya secara publik.

Pendapat di atas muncul karena saat orang dimintai tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertama-tama orang-orang cenderung terlebih dahulu mengupas, siapa-siapa korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh publik dinilai kualitas personalnya, lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi, seperti apakah ia perempuan "baik-baik" atau perempuan yang relatif/kurang lebih "memang pantas" untuk diperkosa. Tentu saja memastikan siapa korban bukanlah tindakan keliru, tetapi apabila mengandung penilaian kualitas pribadi, dan lebih-lebih berlagak menghakimi, maka penilaiannya jelas tidak adil, bukan tidak mungkin malah menyesatkan.

Sesungguhnya betapa tidak mudah menjadi perempuan korban perkosaan. Mereka bukan saja dianiaya secara fisik melainkan perasaannya pun telah digempur habis-habisan dan barangkali penyebabnya juga berkaitan erat dengan bangunan relasi sosial kita selama ini. Bila dugaan itu benar, maka tindakan perkosaan bukan semata-mata tindakan kejahatan seorang laki-laki pada perempuan melainkan efek dari kultur sosial yang menindas. Melalui berbagai laporan, artikel dan hasil-hasil penelitian mengenai perempuan terdapat kesimpulan bahwa relasi sosial yang ada sekarang telah mereduksi perempuan dan sifatnya sangat patriarkhis.

Patriarkhis adalah suatu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, juga seorang perempuan sudah semestinya dikontrol oleh laki-laki karena dirinya adalah bagian dari milik laki-laki.

Kejahatan perkosaan bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan perkosaan bukan didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan menengah atau rendah apalagi kurang/tidak berpendidikan, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Dengan demikian, meningkatnya gejala kejahatan perkosaan bukan lagi "milik" golongan masyarakat menengah ke bawah saja melainkan sudah melanda golongan atas.

Upaya perekayasa hukum atas perkosaan di Indonesia merupakan momen tepat dewasa ini dalam rangka penyusunan hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP nasional sudah selesai disusun, namun ketentuan sekitar tindak pidana perkosaan masih kiranya memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut viktimologi (korban kejahatan).

Kejahatan seksual, khususnya pada perkosaan sangat menarik perhatian untuk dibahas, karena : 1) kasus-kasus tindak pidana perkosaan walaupun sudah lama ada, namun hingga dewasa ini masih menimbulkan pro dan kontra atas konsepsi dan cara penanggulangannya; 2) inisiatif korban-korban kejahatan perkosaan untuk melaporkan kepada kepolisian ternyata menunjukkan intensitas yang agak rendah dibandingkan dengan kejahatan kekerasan lainnya; 3) kejahatan perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan kejahatan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik perkosaan dan posisi wanita dalam hukum pidana Indonesia?

2. Mengapa kajian pada aspek viktimologi sangat penting dalam konteks kasus perkosaan ?
3. Upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan?

1.3. Tujuan dan Metode Kajian

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik perkosaan dan posisi wanita dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Mengetahui aspek viktimologi terhadap kasus perkosaan.
3. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan perkosaan.

Adapun metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode telaah atas kepustakaan. Artinya dengan melakukan eksplanasi dan elaborasi terhadap berbagai karya ilmiah yang cukup relevan dengan permasalahan. Hasil kajian dari berbagai pustaka dideskripsikan, disistematisasi dan dianalisis.

II. PEMBAHASAN

2.1. Karakteristik Perkosaan dan Posisi Wanita dalam Hukum Pidana Indonesia.

Sebelum mengemukakan mengenai batasan dari kejahatan perkosaan, kiranya perlu dikemukakan beberapa karakteristik umum dari suatu perkosaan. Karakteristik utama dari kejahatan perkosaan adalah bahwa perkosaan bukanlah merupakan ekspresi agresivitas (baca : kekerasan) dari seksualitas melainkan sebagai ekspresi seksual dari suatu agresivitas. Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori "*sexually assaultive behaviour*" (Kadis, Sanford, 1983 : vol 4).

Mengacu pada karakteristik utama tersebut di atas maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut :

1. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan

2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu dan keinginan semata-mata.
4. Tindak perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu : (a) *anger rape*; (b) *power rape*; (c) *sadistic rape*.
5. Kepribadian pelaku perkosaan memiliki lima karakteristik seperti : (a) adanya mispersepsi pelaku terhadap sikap si korban, sehingga pelaku tidak merasa memperkosa; (b) pelaku cukup sering mengalami pengalaman buruk dalam hubungan pribadi; (c) pelaku pada umumnya orang yang terasing di dalam pergaulan sosialnya dan kebanyakan merupakan pribadi rendah diri; (d) pelaku merupakan orang yang penuh dengan kekecewaan; (e) pelaku pada umumnya pribadi yang mengalami ketidakseimbangan emosional.
6. Di lain pihak kepribadian dari korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang "partisipatif" dalam konteks tindak perkosaan itu sendiri.
7. Kasus-kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik : kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dapat dibuktikan, bahkan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti dimulai sidang pengadilan (Romli Atmasasmita, 1995 : 108-109).

Ketujuh karakteristik umum tersebut di atas mengacu kepada hasil penelitian di Amerika Serikat dan karakteristik ini belum tentu sama dengan karakteristik tindak perkosaan di Indonesia.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kondisi dan bentuk tindak perkosaan serta pelecehan seksual di Indonesia dapat dikemukakan ada tiga karakteristik khas yaitu : (a) adanya sikap

ramah kepada setiap orang sekalipun belum dikenal baik; (b) menjunjung tinggi secara berlebihan mengenai simbol “kebakakan” atau “paternalisme”; dan (c) adanya tindak perkosaan yang dilakukan (khusus terhadap anak gadis di bawah umur) untuk memperoleh kekuatan magis (Romli Atmasasmita, 1995 : 109-110).

Mengenai pengertian perkosaan, telah dikenal dan juga diatur dalam KUHP, khusus pada Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, maka akan diancam karena melakukan permerkosaan dengan pidana penjara 12 tahun”..

Dengan demikian, esensial KUHP memandang bahwa suatu perbuatan itu disebut sebagai perkosaan bila : (1) pelaku, adalah laki-laki/pria yang dapat melakukan persetubuhan; (2) para korban, wanita/perempuan yang bukan istrinya; (3) adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan; (4) terjadi persetubuhan.

Unsur-unsur tersebut berlakunya secara kumulatif dalam artian untuk dapat dikatakan suatu permerkosaan haruslah memenuhi keempat unsur tersebut. Sehingga dari unsur-unsur pasal atas perkosaan di atas tadi bukanlah disebut perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetubuhan. Padahal usaha-usaha untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit sekali.

Dari uraian tersebut di atas, maka Soetandyo W. Soebroto (Eko Prasetyo, 1977 : 25), menyatakan bahwa perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki atas seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian seperti ini apa yang disebut perkosaan ini di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan serta di pihak lain dapatlah

dilihat pula sebagai peristiwa (pelanggaran norma dan tertib sosial).

Membicarakan masalah perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia, pada dasarnya menempatkan posisi wanita dalam kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. KUHP pidana yang kita pakai sekarang adalah hasil konstruksi masyarakat barat di abad lampau yang individualis terhadap masalah kesusilaan atau seks. Karena itu wanita selalu menjadi korban aturan hukum yang tidak adil.

2.2. Kejahatan Perkosaan dalam Perspektif Victimologi

Dalam sistem pembuktian di Amerika Serikat, wanita korban perkosaan merupakan pihak yang sangat dirugikan baik fisik, mental dan statusnya. Bahkan *Common Law* dan pengadilan sering untuk menafsirkan adanya “*no consent*” dari korban, disyaratkan adanya penyelidikan atau pemeriksaan atas apa yang sedang dipikirkan oleh si korban selama proses permerkosaan itu berlangsung. Persyaratan tersebut jelas menempatkan si korban perkosaan pada kedudukannya sebagai “tertuduh”, lebih buruk keadaannya jika dibandingkan dengan pelakunya yang seharusnya menjadi tertuduh. Apabila dikaji dari segi victimologi (ilmu korban atas kejahatan) maka kasus perkosaan menurut sistem hukum atas pembuktian di Amerika Serikat/USA telah menimbulkan victimisasi struktural terhadap pihak korban-korban perkosaan.

Di Indonesia, hukum mengenai perkosaan dapat diambil contoh ketentuan Pasal 285 KUHP & Pasal 423 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) Indonesia.

Di dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, hanya terdapat dua unsur dalam upaya pembuktian ada ataupun tidaknya tindak pidana perkosaan, yaitu : (1) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; dan (2) hubungan seksual dengan seorang

wanita di luar perkawinan. Sedangkan jika memperhatikan ketentuan pada Pasal 423 RKUHP, rumusan tindak pidana perkosaan berbeda secara fundamental dengan ketentuan pada pasal 285 KUHP. Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RKUHP memperluas Pasal 285 KUHP. Di dalam RKUHP tindak pidana perkosaan diformulasikan sebagai berikut :

Pasal 423

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - a. Laki-laki atau pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, dan bertentangan dengan kehendak perempuan itu.
 - b. Laki-laki atau pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
 - c. Laki-laki atau pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
 - d. Laki-laki atau yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
 - e. Laki-laki atau pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dengan persetujuannya atau,
 - f. Laki-laki atau pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal sudah diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya.
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan, jikalau dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Laki-laki memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
- b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan (rancangan KUHP 2000 : 160-161).

Dengan demikian, rumusan hukum mengenai tindak pidana perkosaan di dalam naskah rancangan hukum pidana yang akan datang, selintas tampak bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk seluas mungkin dapat menjaring pelaku "tindak pidana perkosaan" dari kemungkinan luput dari penuntutan dan untuk melindungi hak asasi kaum wanita dari perlakuan semena-mena pihak laki-laki.

Di lain pihak jika diamati secara teliti dan mendalam, isi ketentuan tersebut di atas mengandung makna dan dampak yang luas di dalam sistem pembuktian yang diterapkan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana perkosaan di muka sidang pengadilan. Bahkan dengan sistem pembuktian yang akan diterapkan memiliki perbedaan fundamental dengan sistem pembuktian selama ini selalu dipergunakan dalam menerapkan ketentuan Pasal 285 KUHP.

Selama ini dalam praktek pembuktian Pasal 285 KUHP, alat bukti yang menentukan dalam kasus tindak pidana perkosaan adalah keterangan ahli (*visum et repertum*), selain harus ada keyakinan hakim. Sedangkan menurut Pasal 423 RKUHP alat bukti yang sangat menentukan ialah, keterangan saksi korban. Keterangan saksi korban ini harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di muka sidang pengadilan.

Persoalan yang relevan dan amat penting dalam konteks kasus tindak pidana perkosaan di kemudian hari yang diatur dalam Pasal 423 RKUHP ialah bagaimana jika korban perkosaan adalah seorang perempuan yang memiliki latar belakang kehidupan pribadi dan reputasi yang buruk

di masyarakat. Misalkan kalau tertuduh atau penasihat hukumnya meminta *cross examination* atas saksi korban, apakah faktor latar belakang kehidupan ini dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian?

Akan terdapat pelbagai persoalan yang akan dihadapi apabila mengacu kepada Pasal 423 RKUHP. Apabila tidak sejak awal dipertimbangkan dengan hati-hati akan merupakan kendala serius di dalam membuktikan kasus tindak pidana perkosaan di masa yang akan datang.

Persoalan ini akan bertambah rumit lagi jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia yang kebanyakan memandang persoalan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan di muka umum, apalagi tindak pidana perkosaan. Sekalipun masyarakat kita sangat mencela perbuatan tersebut, akan tetapi kultur masyarakat sedemikian akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan untuk enggan melapor pada kepolisian, apalagi diajukan menjadi saksi korban di muka sidang pengadilan. Dari sudut pandang kriminologi dan viktimologi, kultur masyarakat seperti itu akan menumbuhkan dan memperkuat akar bagi terjadinya stigmatisasi dan viktimisasi struktural terutama bagi pihak-pihak korban tindak pidana perkosaan (Nursyahbani, 1995 : 11).

2.3. Upaya Penanggulangan.

Upaya menanggulangi kejahatan perkosaan diperlukan adanya langkah-langkah preventif. Upaya preventif yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan tiga pihak yaitu : pertama, dari masing-masing individu, agar selalu mawas diri dan menjaga dirinya sendiri. Harus dihindari segala keadaan yang akan memungkinkan atau mendorong terjadinya perkosaan. Kedua, dari pihak masyarakat, hendaklah melakukan perannya dengan baik untuk meminimalkan segala keadaan yang mendorong terjadinya perkosaan di sekitar lingkungannya.

Ketiga, dari pihak pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai *public service*, hendaklah terus melakukan penertiban terhadap film-film maupun gambar-gambar porno, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan patroli-patroli di jalan untuk upaya mengantisipasi keadaan terutama pada daerah-daerah rawan.

Mengingat kompleksitas dan kekhususan yang harus dihadapi oleh korban-korban perkosaan, maka sudah seharusnya ada perlindungan yang khusus bagi korban perkosaan. Guna melindungi korban perkosaan diperlukan berbagai upaya sebagai berikut :

Dimulai dari sistem hukumnya, yaitu proses acara pidana dengan melakukan revisi terhadap KUHP. Ini berarti bukan hak-hak asasi pelaku saja yang dilindungi, tetapi hak asasi korban harus dihormati dan diperjuangkan.

Aparat penegak hukum dalam memperlakukan korban-korban hendaknya memperhatikan faktor psikologis korban, bahkan kalau perlu melibatkan psikolog atau aparat penyidik yang mengerti ilmu psikologi.

Memperbaiki mental masyarakat agar lebih dewasa dan arif/bijaksana dalam menyikapi para korban perkosaan. Karena apabila lingkungan turut "menghakimi" korban, maka pengalaman traumatik itu akan bertambah parah.

Hendaknya para korban perkosaan didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum wanita manakala memperjuangkan haknya mulai dari penyidikan hingga ke persidangan untuk mendapat dukungan moril.

Perlu didirikan pusat terapi bagi korban kejahatan perkosaan yang meliputi pemberian pelayanan hukum, pelayanan konsultasi psikologis, pelayanan kesehatan dan pembinaan kerohanian atau spritual, sehingga mereka punya kemampuan untuk kembali beraktivitas di dalam lingkungan masyarakatnya yang lebih luas.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kejahatan perkosaan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan seksual (*sexual offenses*). Karakteristik umum tindak pidana perkosaan berbeda dengan karakteristik tindak pidana kekerasan yang lainnya (pembunuhan, penganiayaan berat atau pencurian dengan kekerasan).

Perbedaan ini terletak pada karakteristik, baik pada pelaku maupun pada si korban. Karakteristik pada pelaku umumnya memiliki 5 motif alternatif (*power motive, sexual motive, socio-sexual motive, grievance motive* dan *coercive sexual motive*). Kemudian karakteristik pada korban perkosaan pada umumnya adalah wanita dan korban wanita terbanyak adalah mereka yang sering berada di luar dan jauh dari rumah kediamannya. Selain itu korban sering dipandang "berpartisipasi" dengan tindak pidana perkosaan tersebut, apalagi hubungan korban dengan pelaku sangat erat. Dalam konteks hukum pidana yang berlaku sekarang ini di Indonesia, ternyata masih menempatkan wanita sebagai korban aturan hukum yang tidak adil.

Perspektif viktimologi atas tindak pidana perkosaan menjelaskan bahwa, peranan para korban dalam tindak pidana perkosaan tidak dapat diabaikan sejalan dengan konsep *victim precipitation*.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan unsur ; individu (perempuan), masyarakat serta pihak pemerintah atau penegak hukum.

Mengingat kekhususan persoalan korban perkosaan maka diperlukan perlindungan khusus bagi para korban baik dari segi hukum, psikologis serta pemberian jenis pelayanan lainnya pada korban perkosaan.

3.2. Saran-Saran/Rekomendasi

Perlu adanya upaya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyingkapkan kasus

perkosaan. Tumpuhnya rasa kepedulian dan keprihatinan masyarakat dalam merespon kejahatan perkosaan akan memperberat penderitaan batin korban perkosaan.

Agar terus digalakkan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak awam hukum dan mengerti kewajiban dan hak-haknya di dalam hukum.

Penderitaan para korban perkosaan harus segera diakhiri dengan memberikan perlindungan hukum yang adil, karena bagaimanapun korban perkosaan adalah bagian dari masyarakat kita sendiri.

Sudah saatnya pelaku perkosaan dijatuhi pidana yang setimpal agar efek penjeratan dapat maksimal, baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Irwan, 1996, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, dalam Agus Swiyanto & Penduduk Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Katjasungkana, Nursyahbani, 1995, *Dialog Tentang Perkosaan*, dalam Tabloid Nova, Nomor 393/VIII, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo Eko, Suparman Marzuki (ed), 1997, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.
- Sanford, Kadish, 1983, *Encyclopedia of Crime & Justice*, Vol. 4, Free Press.